

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISTRIBUSI GARAM
DI DAERAH JONO
(Studi Kasus di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)**



**Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**HERU SULASTIONO
C100100039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

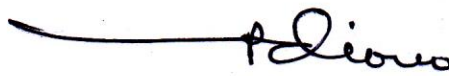
TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISTRIBUSI GARAM DI DAERAH JONO
(Studi Kasus di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
Heru Sulastiono
C 100 100 039

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Mengetahui
Pembimbing Utama



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISTRIBUSI GARAM DI DAERAH
JONO**

(Studi Kasus Di Desa Jono Kecamatan Tawngharjo Kabupaten Grobogan)

Yang ditulis oleh :

HERU SULASTIONO

C 100 100 039

Telah Diterima Dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 3 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, SH.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Inayah, S.H.,MH.

(.....)

Anggota : Shallman Al Farizi, SH.MH.M.Kn.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 April 2017

Penulis



HERU SULASTIONO

C100100039

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISTRIBUSI GARAM DI DAERAH
JONO
(Studi Kasus di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola distribusi garam dan menganalisa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris/sosiologis. Penelitian dilaksanakan di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Sumber data menggunakan data primer. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah menggunakan pola distribusi tidak langsung yaitu petani garam melibatkan pihak lain untuk membantu menyalurkan garam kepada konsumen (tengkulak, pedagang/agen, serta industri kecil dan menengah); *Kedua*, perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan: a) Kewajiban pedagang membeli garam dari petani; b) Kewajiban industri garam untuk mengolah melalui proses pencucian dan iodisasi; c) impor garam yang diperketat untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan keuntungan petani garam.

Kata Kunci: *Pola Distribusi Garam, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Distribusi Garam*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the distribution pattern of the salt and analyzing legal protection for businesses involved in the distribution of salt. This research includes empirical juridical legal research / sociological. The research was conducted in the village Jono Tawangharjo Subdistrict Grobogan. The data source using primary data. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: First, the distribution pattern of the salt in the Village Jono Tawangharjo Subdistrict Grobogan is using indirect distribution pattern that is producing salt involve others to help distribute salt to consumers (brokers, dealers / agents, as well as small and medium enterprises); Second, the legal protection for businesses involved in the distribution of salt in the Village Jono Tawangharjo Subdistrict Grobogan: (a) Liability traders buy salt from farmers; (b) The obligation of the salt industry to process through the washing process and iodized; (c) the import of salt is tightened to provide protection and improve the profitability of the salt.

Keywords: Salt distribution patterns, Legal Protection for Distribution Garam Executors

1. PENDAHULUAN

Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk konsumsi, garam banyak diperlukan dalam beberapa industri, diantaranya untuk pengawetan dan campuran bahan kimia. Banyaknya kebutuhan garam membuat negara harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Namun karena dari segi produksi, Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, maka impor menjadi salah satu solusi jangka pendek.¹

Persoalan ketidakmampuan garam rakyat dalam memenuhi memasok kebutuhan garam nasional tidak hanya diakibatkan oleh *supply and demand*, tetapi juga karena kualitasnya. Menurut Pasal 1 Keppres No. 69 Tahun 1994 menyatakan: “Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Industri Indonesia (SII)/ Standar Nasional Indonesia (SNI)”.

Petani garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan belum semuanya mampu memproduksi garam yang sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Garam yang dibuat dari mata air asin di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan disebut Garam Indigenus Grobogan (GIG) atau Garam Jono. Kandungan NaCl Garam Jono rata-rata dibawah 90% dengan kandungan yodium di bawah 30 ppm, sehingga tidak memenuhi standar SNI, sehingga untuk pemasaran dan distribusinya mengalami hambatan.

Model distribusi yang berlaku selama ini adalah petani memproduksi garam kemudian dibeli oleh pedagang pengepul. Dari pedagang pengepul, garam yang masih bahan mentah dijual ke IKM garam untuk diolah menjadi garam siap saji. Keberadaan IKM garam ini tentunya berpengaruh terhadap kekuatan petani walaupun pengaruhnya tidak langsung. Pelaku industri memanfaatkan kecilnya informasi yang diterima oleh petani untuk menekan

¹ Badan Pusat Statistik RI. 2014. *Data Kebutuhan dan Produksi Garam Nasional 2004-2013*. Jakarta: tidak diterbitkan, hal. 14

harga garam di tingkat petani. Kondisi itu menimbulkan informasi yang tidak sempurna tentang kondisi pasar. Para petani garam tidak bisa menghindar dari kondisi ini karena mereka sudah tergantung dengan para pedagang baik pedagang besar maupun pedagang pengepul atau tengkulak.

Kondisi distribusi garam di tingkat petani di Desa Jono, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan memang memang tidak dipisahkan dari peran pedagang pengepul, tengkulak, dan industri garam. Kondisi pasar dan informasi yang tidak sempurna dimanfaatkan pedagang untuk menekan harga garam petani. Harga yang terus tertekan akan membuat keuntungan yang diperoleh semakin lama akan semakin berada pada titik normal profit yang artinya adanya kerugian jangka panjang bagi petani sehingga banyak petani garam yang akan menutup usahanya.

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang distribusi garam rakyat di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang berasal dari produsen ke konsumen, produsen ke agen dan agen ke konsumen. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG DISTRIBUSI GARAM DI DAERAH JONO (Studi Kasus di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi suatu permasalahan yaitu: *Pertama*, bagaimanakah pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan?; *Kedua*, bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan?

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan; *Kedua*, untuk menganalisa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Manfaat penelitian ini adalah: *Pertama*, manfaat teoritis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya;

Kedua, manfaat praktis berupa memberikan bahan masukan mengenai pengaturan pola distribusi garam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.² Sumber data menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan melalui wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola Distribusi Tidak Langsung Terhadap Garam Hasil Penambangan di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan

Para pihak yang terlibat dalam pola distribusi tidak langsung terhadap garam hasil penambangan di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah petani garam, tengkulak, pedagang/agen, serta industri kecil dan menengah. Petani garam di Desa Jono menjual garam ke tengkulak dalam bentuk curah dan yang kemudian dikemas oleh tengkulak dalam karung 50kg. Tengkulak melakukan penaksiran harga garam grosok petani di tambang kemudian melakukan menjual kembali dalam bentuk yang sama tanpa memberikan perlakuan khusus. Pedagang besar di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo mendistribusikan hasil pembeliannya kepada pabrik dan kemudian membeli lagi hasil produksi pabrik untuk diecerkan kepada pedagang pengecer yang ada di tiap Kecamatan. Pabrik UMKM mengolah garam grosok menjadi garam SNI kemudian dikemas dalam bentuk kemasan berlabel.

² Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Hal. 8

Distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah distribusi tidak langsung yang melibatkan beberapa pihak yaitu petani garam, tengkulak, pedagang/agen, serta industri kecil dan menengah. Struktur pasar yang terbangun oleh pola hubungan antara petani dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari petani, tengkulak atau pengepul, pedagang distributor, dan pabrik. Jaringan distribusi ini menguasai akses pasar; bahkan struktur pasar dibangun melalui relasi-relasi sosial yang saling mengikat mereka dalam suatu jaringan. Artinya petani sangat tergantung kepada tengkulak karena ketidakmampuan mereka mengolah bahan garam menjadi garam yang layak konsumsi. Tengkulak memanfaatkan kondisi ini dengan menekan harga di tingkat petani dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Hal ini tidak dapat dihindari sehingga petani selalu di pihak yang lemah.

Sesuai dengan pendapat Lorraine Culley dalam Yety Rochwulaningsih, bahwa para pelaku pasar di level petani ini tidak berada dalam sebuah wadah organisasi, mereka merasa dalam suatu jaringan pemasaran yang masing-masing pihak harus selalu mengakui dan memperhitungkan; bahkan di antara mereka saling berkomunikasi jika dipandang perlu untuk mengingatkan kembali komitmen masih berada di jaringan distribusi. Menurut penjelasan pelaku pasar ini, para petani tidak akan berani melanggar kesepakatan dan memainkan harga terutama mematok harga lebih tinggi dari harga pasar, risikonya terlalu besar. Tindakan itu dipandang melanggar *rule of the game* dengan merusak pasar dan untuk itu secara sistemik bisa membuat mereka tersingkir dari jaringan pelaku pasar karena dijauhi komunitasnya.³ Akibatnya petani menjadi kesulitan menjual hasil tambang garamnya.

Secara kualitas produksi garam konsumsi di Desa Jono masih kurang baik. Pengolahan garam konsumsi di daerah ini umumnya masih sangat sederhana sehingga sulit diharapkan memenuhi Standar Nasional

³ Yety Rochwulaningsih. 2013. *Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural*. Jurnal Sejarah CITRA LEKHA Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Vol. XVII, No. 1 Februari 2013: 59-66

Indonesia (SNI) yaitu 30 – 80 ppm. Terkait kualitas, ada beberapa kendala yang berkaitan dengan produksi pengolahan garam konsumsi di Kabupaten Grobogan. Pertama, bahan baku yang dihasilkan para petani garam umumnya memiliki kualitas kurang baik. Ini berarti garam krosok bahan baku pengolahan garam konsumsi dari Grobogan memiliki kandungan air lebih tinggi. Dampaknya, kualitas yang dihasilkan relatif lebih rendah dan saat diolah menjadi garam konsumsi akan lebih boros (inefisien) untuk percampuran yodium.

Garam yang dihasilkan oleh petani garam Grobogan masih mengandung NaCl di bawah standar SNI. Berikut penuturan dari informan yang merupakan petani garam Desa Jono Kecamatan Tawangharjo: garam yang dihasilkan oleh petani Grobogan belum memenuhi syarat SNI yaitu minimal NaCl yang terkandung dalam garam konsumsi adalah 94,7%. Hal tersebut dikarenakan pengolahan garam yang masih menggunakan cara tradisional, sehingga air yang digunakan untuk membuat garam kurang kualitasnya.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 Tentang Ketentuan Impor Garam bahwa “Pedagang asosiasi garam wajib membeli garam dari petani garam. Pembelian garam petani dibuktikan dengan surat pernyataan perolehan garam dari petani garam, di dalamnya menyatakan jumlah garam yang dibeli serta harga pembelian di tingkat petani. Hal ini berarti hak petani garam merupakan kewajiban pedagang yaitu membeli dari petani. Selanjutnya menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium menyatakan sebelum diperdagangkan, garam wajib terlebih dahulu diolah melalui proses pencucian dan iodisasi. Hal ini menjadi kewajiban dari para pelaku industri garam.

Petani garam di Desa Jono memasarkan garamnya melalui jasa tengkulak, pengepul atau menjual langsung ke pabrik garam. Merujuk pada Keppres No. 69 tahun 1994 tentang pengadaan garam beryodium

tersebut, petani belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan kewajibannya untuk memproduksi garam sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu petani mendistribusikan kewajibannya kepada pihak lain mulai dari tengkulak, pedagang besar, hingga industri agar garam dapat diolah dan dikemas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa petani garam menjadi pihak yang paling lemah dalam mata rantai distribusi garam. Hak-hak petani untuk mengolah dan menentukan harga jual tidak dapat dilaksanakan karena aturan memaksanya demikian. Kemampuan produksi garam oleh petani tidak sesuai dengan regulasi sehingga berdampak pada menurunnya hak-hak petani garam.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Distribusi Garam

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi petani garam. Menurut Permendag No. 58/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 4 September 2012, secara eksplisit ditegaskan bahwa garam yang boleh diimpor adalah garam konsumsi dan industri. Garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7 persen dari basis kering, sedangkan garam industri adalah garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen. Garam konsumsi hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Garam Konsumsi dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sedangkan garam industri hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Garam atau penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Garam yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha garam dan diijinkan untuk mengimpor garam (Pasal 2).

Salah satu pasal dalam Permendag diatur bahwa impor garam dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat.

Penentuan masa panen garam rakyat semula dilakukan oleh Menteri Kelautan Perikanan dan kemudian, berdasarkan Permendag yang baru, diatur oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan hasil prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan kesepakatan rapat koordinasi antara kementerian dan asosiasi. Larangan impor garam juga berlaku apabila harga garam K1 dan K2 dalam bentuk curah di titik pengumpul (*collecting point*) di atas truk masing-masing berada di bawah harga minimal yang ditetapkan pemerintah, yaitu minimal Rp 750,-/kg untuk KP1 dan Rp 550,-/kg untuk KP2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani garam di Kecamatan Tawangharjo belum mengetahui dan paham mengenai isi dari Keppres Nomor 69/1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium. Pemahaman masyarakat terhadap No. 69/1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium juga dimintakan konfirmasinya kepada salah seorang petugas yang bertugas mengawasi penggunaan garam beryodium di Kecamatan Tawangharjo. Bapak Nanang Hardiyanto selaku petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan mengungkapkan sebagai berikut: “Belum semua pihak memahami isi Keppres tentang Pengadaan Garam Beryodium baik dari produsen garam maupun dari aparat pemerintah sendiri. Di lokasi penelitian juga ditemukan fakta bahwa ternyata masyarakat di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan cenderung lebih suka mengkonsumsi garam krosok. Masyarakat di Kecamatan Tawangharjo lebih suka mengkonsumsi garam krosok untuk masak karena selain lebih murah juga lebih mudah karena tinggal mengambil.”⁴

Dari informasi dari para informan di atas, terungkap bahwa pola budaya masyarakat juga sangat mempengaruhi implementasi dari Keppres Nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium di Kecamatan

⁴ Nanang Hardiyanto, 2016, Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, *Wawancara Pribadi pada Kamis, 2 Juni 2016*.

Tawangharjo. Masyarakat di sana dengan berbagai alasan lebih suka mengonsumsi garam krosok atau garam yang belum diberi iodium. Jadi melaksanakan implementasi dari Keppres tersebut sangat penting sekali untuk terlebih dahulu mengubah budaya masyarakat dan pandangannya mengenai kebiasaan mengonsumsi garam krosok. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa garam beryodium sangat penting untuk memelihara fungsi tubuh. Apabila kekurangan yodium dapat mengakibatkan munculnya penyakit gondok, keguguran pada ibu hamil dan pada orang dewasa bisa menyebabkan gangguan pada fungsi mental.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah menggunakan pola distribusi tidak langsung yaitu petani garam melibatkan pihak lain untuk membantu menyalurkan garam kepada konsumen (tengkulak, pedagang/agen, serta industri kecil dan menengah); *Kedua*, perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan: (a) Kewajiban pedagang membeli garam dari petani; (b) Kewajiban industri garam untuk mengolah melalui proses pencucian dan iodisasi; (c) impor garam yang diperketat untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan keuntungan petani garam.

4.2 Saran

Pertama, bagi petani garam dapat membentuk Asosiasi Petani Garam untuk mengganti posisi pedagang. Asosiasi ini dapat membentuk badan hukum yang dapat menaikkan posisi tawar terhadap pabrik/industri.

Kedua, bagi Pemerintah Daerah, kebijakan pemerintah daerah agar diarahkan pada: (a) Penetapan standar perijinan pengolahan garam konsumsi, berkaitan dengan sarana/prasarana yang wajib dimiliki

pengusaha; (b) Pengawasan terhadap produksi pengolahan garam konsumsi agar menggunakan standar sarana yang memadai; dan (c) Pemberlakuan sanksi yang jelas bagi usaha pengolahan garam konsumsi yang tidak memenuhi standar input (sarana/prasarana) dan standar proses.

Ketiga, bagi Pemerintah Pusat, Perlu membuat regulasi yang dapat: (a) Mendorong usaha pengolahan garam konsumsi agar meningkatkan produksinya; (b) Melakukan pendampingan kepada petani tambak garam untuk menghasilkan bahan baku produksi garam konsumsi yang berkualitas baik; dan (c) Mengundang investor untuk berinvestasi dalam pengolahan garam konsumsi.

Bagi penelitian berikutnya, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam sebuah distribusi produk alam dan pertanian.

PERSANTUNAN

Penelitian ini tidak terlepas dari dukungan semangat dan moril dari berbagai pihak. Dukungan-dukkungan tersebut telah menjadi dorongan untuk terselesaikannya penelitian ini. Kontribusi di luar penelitian yang menginginkan peneliti segera menyelesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum bisa terealisasi. Mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta bersyukur kepada Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya serta teman-teman yang telah memberikan doa dan semangat. Saya benar-benar bersyukur.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: CV Rajawali

Gitosudarmo, Indriyo. 2001, *Pengantar Bisnis*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Yogyakarta: BPFE UGM

Laksana, Fajar. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Rochwulaningsih, Yety. 2013. Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi ke-11. Jakarta: UI-Press

Sudiyono, A. 2001. "*Pemasaran Pertanian*". Malang : Universitas Muhamadiyah Malang

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat Sebagai Undang-Undang.

Keppres No. 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 3556:2010 tentang Garam Konsumsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No 5 tahun 2008 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.